

Dalam praktek kehidupan pers sehari-hari, berlaku hubungan pers dan pemerintah yang sifatnya *symbiosis-mutualisme*. Hal ini mendorong pers di Indonesia untuk mencoba saling menghidupkan antara kepentingan pers di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Hubungan tersebut tercermin dalam tulisan-tulisan dalam rubrik redaksi baik tajuk rencana maupun tulisan artikel opini dari penulis lepas atau di luar institusi surat kabar tersebut. Semua tulisan tersebut akan melalui proses yang disebut *self-censorship* dan *gate keeper* atau penjaga gawang akan cukup berperan di dalamnya.⁴⁸ Dengan adanya isu kontroversial yang menimbulkan konflik terkait beberapa pihak tugas-tugas penjaga gawang akan mengarah kepada keputusan-keputusan tertentu. Dampak dari tugas *self-censorship* yakni munculnya tulisan-tulisan tajuk yang bernada lebih positif terhadap suatu isu yang kontroversial. Namun berbeda keadaannya apabila isu-isu kontroversial tersebut ditulis oleh para pakar ataupun masyarakat luas dalam rubrik artikel. Karena itu pula, akan sering terjadi bahwa tulisan-tulisan yang dituangkan dalam bentuk artikel semasa kampanye berlangsung akan lebih berani.⁴⁹ Meskipun demikian, artikel semacam ini pada umumnya juga berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari pendapat surat kabar itu sendiri.⁵⁰

Mc Quail menjelaskan bahwa faktor politis akan sangat berdampak bagi institusi media.

Faktor yang bersifat politis akan berkenaan dengan pelbagai kecenderungan otoritas eksternal untuk membatasi atau mengatur media yang dapat bersikap konformis atau kritis terhadap otoritas yang mapan. Ada tidaknya kontrol biasanya berkaitan dengan variabel lainnya, kadar pemusatan perhatiannya terhadap kekuasaan negara. Hal tersebut

⁴⁸ Suwardi, *Op. cit.*, hlm. 225

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 85

umumnya tergantung pada fungsi yang lazim, semakin besar keterlibatan media dalam gelanggang politik semakin besar pula perhatian pemegang kekuasaan dan pesaingnya terhadap media tersebut.⁵¹

Dengan demikian media menggunakan potensinya untuk mengkritik ataupun tidak tergantung pada kondisi dan situasi politik di mana media itu hidup, serta pilihan pendirian yang ditentukan oleh media itu sendiri.

Kaitannya dengan kekuasaan, dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dalam Suwardi menambahkan bahwa pada umumnya media dimanapun dalam hal-hal tertentu, apabila dekat dengan pusat kekuasaan, ada kecenderungan besar akan bersifat reaktif dan terkadang vokal terhadap penguasa. Hal tersebut berbeda dengan pers (media) daerah yang letaknya jauh dari pusat kekuasaan ada kecenderungan bersikap suportif kepada penguasa. Namun gejala ini dimungkinkan muncul bila hubungan antara pers dan pemerintah dipertanyakan. Hal ini disebabkan karena makin dekatnya media dengan para pengambil keputusan sehingga memungkinkan mendapatkan sumber-sumber informasi. Sedangkan pers daerah cenderung bersikap positif, selain karena posisinya yang jauh dari pusat kekuasaan, pers daerah perlu menjaga eksistensinya, sehingga harus menjaga keseimbangan hubungan dengan pemerintah.⁵²

Dalam kehidupan pers, faktor-faktor seperti modal, visi ataupun orientasi akan banyak memberikan pengaruh kepada kebijakan redaksional surat kabar. Dalam beberapa kasus yang ditemui, pers daerah seringkali menemui kendala dalam masalah permodalan (*financial*), distribusi dan manajemen atau

⁵¹ Denis Mc Quail, *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991), hlm. 20

⁵² Suwardi, Op.cit.,hlm. 225

pengelolaan yang menjadi penghambat bagi berkembangnya pers daerah.⁵³ Pertimbangan akan bagaimana secara ekonomi pers daerah terjamin menjadi fokus tersendiri di media massa daerah. Visi dan orientasinya tergantung pada kondisi daerahnya, bagaimana pers daerah menjadi sarana pemenuh informasi, ide dan wadah aspirasi masyarakat setempat mengenai peningkatan sosial, ekonomi maupun potensi kebudayaan.

F. Kerangka Konsep

Artikel opini merupakan sarana bagi masyarakat yang berada di luar institusi media untuk menyatakan pendapat atau gagasan tentang apapun yang berkaitan dengan persoalan publik atau kepentingan umum. Seperti yang dikemukakan Dan Nimmo (1989) bahwa opini merupakan gabungan pikiran, perasaan, dan usul yang diungkapkan secara pribadi terhadap kebijakan yang dibuat pejabat pemerintah dalam situasi yang mengandung konflik.⁵⁴

Perspektif, menurut Rahmat, disebut juga sebagai pendekatan. Ada dua sifat perspektif, yaitu yang bersifat membatasi pandangan dan selektif. Berdasar perspektif itu, seseorang memerhatikan, mengintepretasi dan memberi stimuli dari realitas yang ditemui serta mengabaikan stimuli lainnya, kemudian berperilaku berdasarkan pemahamannya lewat perspektif tersebut.⁵⁵ Sehingga realita yang ditangkap merupakan realita yang telah dipilih dari aspek tertentu, termasuk opini salah satunya, yang merupakan gambaran pikiran dari penulis-penulis opini terhadap isu keistimewaan Yogyakarta.

⁵³ Astrid Susanto, *Komunikasi Massa*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1982), hlm.1.46

⁵⁴ Nimmo, *Loc.cit.*

⁵⁵ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm.50

Dinamika keistimewaan DIY mengalami pasang surut lebih dari sepuluh tahun terakhir, isu ini kembali diperbincangkan ketika muncul stimulus berupa pernyataan kontroversial Presiden SBY. Perihal yang diperdebatkan adalah masih seputar dimensi politik kepemimpinan Yogyakarta. Perumusan UU Keistimewaan masih terjebak dalam permasalahan mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, baik mekanisme pemilihan langsung, penetapan, dan beberapa alternatif yang berusaha diciptakan sebagai jalan tengah persoalan tersebut serta hal-hal lainnya yang sifatnya politis. Terfokusnya permasalahan ini pada aspek politis turut memengaruhi pandangan masyarakat termasuk pandangan politik penulis opini tertuang dalam artikel opini yang terbit di koran-koran.

Isu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai sebagai masalah yang dikedepankan atau untuk ditanggapi.⁵⁶ Nimmo (1989) menyebutkan bahwa isu berkaitan dengan isi informasi. Dalam menanggapi isi informasi, setiap individu memilih alternatif saluran komunikasi dan cara-cara yang berbeda. Perubahan pandangan mengenai cara seseorang menanggapi isu politik dapat berubah seiring dengan adanya riset-riset mengenai persoalan tersebut.⁵⁷

Menurut penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Abdur Rozaki dkk (IRE Pers) mengenai keistimewaan Yogyakarta, mengungkap tiga isu utama dalam pembahasan Keistimewaan DIY, antara lain 1) Posisi keraton di dalam konstelasi politik modern 2) Permasalahan politik pertanahan dan 3) Meletakkan

⁵⁶ www.kamusbesarbahasaIndonesia.org/isu diakses pada 16/1/12

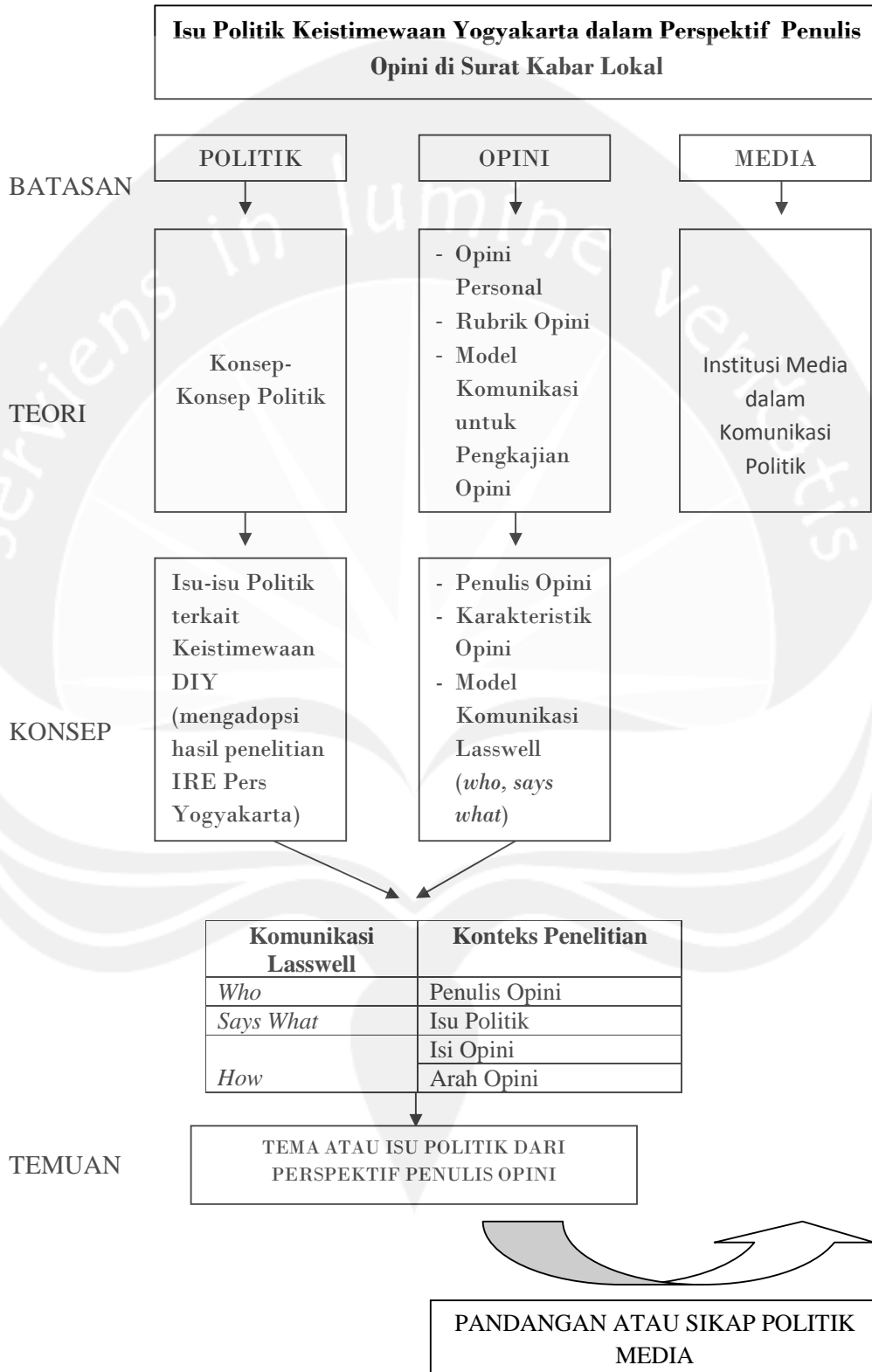
⁵⁷ Nimmo, *Op.cit.*, hlm.172

semangat desentralisasi dalam konteks keistimewaan DIY. Selain isu di atas, beberapa isu lain seperti isu budaya, pendidikan dan pariwisata hanya menjadi isu-isu turunan yang merupakan derivasi dari isu-isu pokok tersebut.⁵⁸

Berkaitan dengan penelitian opini, untuk mengkaji penelitian opini sebagai penelitian komunikasi, penulis menggunakan model komunikasi Lasswell yang diterangkan sebagai berikut: *Who* (siapa) *says what* (bicara apa) *in which channel* (media) *to whom* (kepada siapa) *with what effect* (bagaimana efeknya). Karena penelitian ini merupakan penelitian analisis teks (pesan), penulis hanya mengambil beberapa komponen komunikasi Lasswell antara lain *who* dan *says what*. Penulis menambahkan unsur *how* (bagaimana) sehingga menjadi tiga komponen. (lihat Skema 1.1)

⁵⁸www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/122764-T%2026183.pdf diakses pada 30/09/2011

Skema 1.1 Kerangka Konsep



Untuk mengkaji penelitian ini lebih lanjut, penulis membuat batasan-batasan melalui konsep di atas yang berupa unit analisis dan kategorisasi sebagai berikut.

1. Penulis Opini

Penulis artikel opini dalam *opinion page* surat kabar adalah siapa pun atau semua khalayak media yang menulis dan mengirimkan artikelnya kepada institusi media tanpa melihat perbedaan golongan atau kelompok tertentu. Setiap individu berhak menyuarakan aspirasinya dalam bentuk artikel tanpa dibatasi strata ataupun kelas sosial. Penulis opini bisa berasal dari akademisi, pejabat pemerintah, pegawai non-pemerintahan (swasta), tokoh masyarakat maupun anggota masyarakat yang tidak memiliki otoritas apapun.

2. Isu Politik

Pandangan politik mengadopsi pemikiran atau hasil penelitian dari IRE (*Institute of Research and Empowerment*) Pers Yogyakarta, mengenai isu-isu pokok dalam kajian Keistimewaan DIY. Isu-isu utama berada pada ranah politik antara lain, *pertama* bagaimana posisi keraton dalam konstelasi politik modern, hal tersebut mengacu pada keberadaan keraton dari sisi historis yang telah melakukan proses integrasi dengan NKRI, *kedua*, permasalahan politik pertanahan, diberlakukannya praktek kepemilikan tanah di Jogja yang masih didominasi pola atau model yang selama ini digunakan kerajaan yakni segala sesuatu di dalam kerajaan adalah milik raja dan beberapa tanah di luar yang juga dimiliki raja dapat dimiliki rakyat dengan sistem pemberian. dan *ketiga*, bagaimana meletakkan semangat desentralisasi dalam konteks keistimewaan DIY,

sehingga dalam substansi keistimewaan DIY terkandung kontrak sosial baru yang membingkai semangat berbasis masyarakat diperjelas melalui otonomi daerah.

3. Isi dan Arah Opini

Opini memiliki isi, karena opini adalah tentang sesuatu. Opini merupakan pendapat, gagasan, ide sebagai cermin pemikiran penulis opini yang dinyatakan dengan kalimat-kalimat yang bersifat subyektif. Pernyataan atau kalimat tersebut dapat berupa kritik, dukungan, pujian, saran, himbuan maupun harapan. Sedangkan arah opini adalah kecenderungan atau orientasi opini, dalam konteks penelitian maka arah opini ini berupa mendukung penetapan-menolak penetapan-netral.

Tabel 1.1. Unit Analisis dan Kategorisasi

Unit Analisis	Kategorisasi
Penulis Opini	<ul style="list-style-type: none"> • Pengamat • Akademisi • Pejabat Pemerintah • Pegawai Non-pemerintahan • Para Ahli • Masyarakat
Isu Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan Keraton di dalam konstelasi politik • Permasalahan politik pertanahan • Desentralisasi dalam konteks keistimewaan DIY
Isi Opini	<ul style="list-style-type: none"> • Kritik • Pujian • Saran (Harapan) • Gabungan kritik-pujian • Gabungan pujian-saran • Gabungan saran-kritik
Arah Opini	<ul style="list-style-type: none"> • Pro Penetapan • Kontra Penetapan • Netral

G. Definisi Operasional

Berdasar kerangka konsep di atas, peneliti kemudian menurunkannya menjadi unit analisis dan kategorisasi yang digunakan sebagai acuan penelitian. Untuk memperjelas acuan-acuan yang digunakan untuk penelitian maka perlu adanya definisi operasional dari setiap kategori sebagai berikut:

G.1. Penulis Opini

a. **Pengamat atau pemerhati.** Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)⁵⁹ pengamat berarti orang yang melakukan pengawasan terhadap suatu perbuatan, peristiwa, keadaan, kegiatan dalam bidang-bidang tertentu, seperti pengamat politik, pengamat intelijen, pengamat pendidikan, pengamat musik, pemerhati masalah sosial dan budaya, pemerhati anak, pemerhati masalah kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya.

b. **Akademisi.** Kategori akademisi mencakup antara lain mahasiswa atau pelajar, dosen atau guru atau pengajar, guru besar, alumnus, pejabat dalam institusi pendidikan dan peneliti.

c. **Pejabat Pemerintah.** Penulis opini dalam kategori ini adalah orang yang bekerja di lingkungan pemerintahan seperti anggota DPR/MPR, menteri, pemerintah daerah, pegawai yang bekerja di departemen baik tingkat pusat maupun daerah.

d. **Pegawai non-pemerintah.** Penulis opini dalam kategori ini antara lain pegawai dalam institusi swasta, organisasi-organisasi non-profit, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pengusaha.

⁵⁹ <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php> diakses pada 29/09/2011

e. **Para Ahli**, antara lain seperti sejarawan, budayawan, sastrawan, seniman, sosiolog dan lain-lain.

f. **Masyarakat**, adalah kelompok yang tidak teridentifikasi dalam kelompok di atas, seperti warga Yogyakarta, pensiunan atau purnawirawan.

G.2 Isu Politik

a. Keberadaan Keraton di dalam konstelasi politik

Dalam kategori ini, keistimewaan DIY dititikberatkan pada keberadaan Keraton dan fakta sejarah berintegrasinya Yogyakarta ke dalam NKRI merupakan basis keistimewaan DIY. Pandangan ini ditandai dengan munculnya wacana mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, sehingga erat kaitannya dengan pembahasan demokrasi, sistem kepemimpinan dan pemerintahan DIY. Contoh:

”Dengan alasan penegakan demokrasi, Pemerintah Pusat mengusulkan konsep bahwa Sultan dan Paku Alam berkedudukan sebagai gubernur utama dan wakil gubernur utama. Sedangkan gubernur dan wakil gubernur DIY harus dipilih melalui PemiluKada”. (SKH Kedaulatan Rakyat, 13 Desember 2010)

b. Permasalahan politik pertanahan

Kategori ini menitikberatkan permasalahan keistimewaan DIY pada politik pertanahan di mana praktek-praktek kepemilikan tanah di Jogja masih didominasi pola atau model yang selama ini digunakan kerajaan beserta peraturan perundang-undangannya. Contoh, seperti paragraf pada salah satu artikel sebagai berikut:

Presiden juga menyinggung perlakuan khusus dan peran istimewa bagi pewaris Kesultanan dan Pakualaman secara permanen. Dan tak kalah penting, kepala negara juga menyinggung masalah pengelolaan tanah-kebutuhan dasar dan aset yang sangat berharga bagi sebagian besar rakyat Indonesia, termasuk Yogyakarta. ”Tentang hak eksklusif pengelolaan tanah di Yogyakarta, baik yang menjadi otoritas kesultanan maupun

Pakualaman dan tata ruang khusus pula bagi Daerah istimewa Yogyakarta,” kata Presiden. (SKH Bernas, 14 Desember 2010)

c. Desentralisasi dalam konteks keistimewaan DIY

Pandangan politik ini menitikberatkan pada konsep desentralisasi dalam konteks keistimewaan DIY. Kategori ini ditandai dengan pembahasan konsep otonomi daerah, *local goverment reform*, dan semangat kedaerahan yang terkandung dalam substansi keistimewaan Yogyakarta. Contoh:

Kompleksitas hubungan pusat-daerah pasca era reformasi, seiring menguatnya tuntutan otonomi di sejumlah daerah, telah mendorong terjadinya perubahan paradigma pengelolaan pemerintahan. Dulu, di era Orde Baru (Orba) yang kita ketahui segala pengelolaan serba sentralistik, penerapan paradigma goverment mungkin lebih sesuai. (SKH Radar Jogja, 5 Januari 2011)

G.3 Isi Opini

a. Kritik

Kritik merupakan tanggapan atau respon yang berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya negatif, kecaman, dan umumnya disertai penilaian baik-buruknya terhadap upaya penyelesaian masalah Keistimewaan DIY. Dalam penelitian ini, kritik tercermin dalam pernyataan-pernyataan atau pendapat yang berupa kritik seperti berikut:

”Ini kontroversi, karena tidak sejalan dengan keistimewaan DIY yang selama ini telah berjalan. Ditambah lagi pernyataan Presiden tentang monarki kesultanan. Pernyataan itu kurang tepat bila dipredikatkan ada provinsi ini” (SKH Kedaulatan Rakyat, 6 Desember 2010)

b. Pujian atau dukungan

Pujian atau dukungan adalah pernyataan pendapat yang bersifat memuji, atau positif terhadap upaya penyelesaian masalah keistimewaan DIY. Dalam penelitian ini, pujian atau dukungan tercermin dalam pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau solusi, seperti contoh berikut :

Praktik demokrasi prosedural memang berkembang pesat di seluruh Nusantara selama masa kepemimpinan Presiden SBY ini. Prestasi ini, terlepas dari fakta bahwa yang prosedural belum tentu substansial, patut diapresiasi. Kepemimpinan SBY berhasil mengejawantahkan reformasi sebagai jalan bebas hambatan menuju Indonesia yang demokratis. (SKH Kedaulatan Rakyat, 2 Desember 2010)

c. Saran, harapan, himbauan, solusi.

Saran, harapan, solusi dan atau himbauan ditandai dengan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan untuk dipertimbangkan, memuat solusi untuk memecahkan masalah, dan atau sesuatu yang diharapkan. Dalam penelitian ini, unsur pengharapan tercermin dalam pernyataan-pernyataan yang berupa ekspektasi atau harapan, seperti contoh berikut :”Kita berharap semuanya berlangsung secara konsisten dan tidak berubah menghadapi ’gerilya’ dan ’agresi’ Jakarta.” (SKH Kedaulatan Rakyat. 10 Desember 2010). Sedangkan saran atau solusi ditawarkan seperti dalam paragraf berikut:

”Maka untuk mengatasinya diperlukan jalan tengah dengan *adendum* atau diamandemen UU No 3/1950 dengan tetap mempertahankan pasal 1 ayat 1 dan 2, pasal berikutnya diisi penegasan substansi istimewa bagi DIY menyangkut Amanat Sejarah Pembentukan Pemerintahan DIY, Bentuk Pemerintahan DIY dan Kepala Pemerintahan DIY”. (SKH Kedaulatan Rakyat, 12 Januari 2011)

d. Gabungan Kritik dan Pujian

Kategori gabungan kritik dan saran bila dalam teks penelitian terdapat pernyataan-pernyataan atau pendapat yang berupa kritik dan juga saran atau solusi permasalahan.

e. Gabungan Pujian dan Harapan

Kategori gabungan kritik dan harapan bila dalam teks penelitian terdapat pernyataan-pernyataan atau pendapat yang berupa kritik dan juga harapan dari permasalahan.

f. Gabungan Harapan dan Kritik

Kategori gabungan saran dan harapan bila dalam teks penelitian terdapat pernyataan-pernyataan atau pendapat yang berupa saran dan juga harapan dari permasalahan.

G.4. Arah Opini

a. Pro Penetapan

Kategori pro penetapan dalam penelitian ini ditandai dengan adanya pernyataan yang ditampilkan mendukung atau menyetujui pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY melalui mekanisme penetapan, (tidak mendukung atau menolak mekanisme pemilihan), seperti berikut yang tercantum dalam paragraf berikut:

Dukungan lain pun mengalir seperti keputusan politik DPD DIY terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah dilakukan dengan mekanisme penetapan. Begitupun dukungan dari berbagai elemen masyarakat dan komunitas lokal tetap menyatakan sikap untuk penetapan. (SKH Kedaulatan Rakyat, 14 Desember 2010)

b. Kontra Penetapan

Kategori kontra penetapan dalam penelitian ini ditandai dengan adanya pernyataan yang ditampilkan menolak atau tidak setuju pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY melalui mekanisme penetapan (mendukung atau setuju pada mekanisme pemilihan), seperti berikut yang tercantum dalam paragraf berikut :

Keinginan pihak SBY itu juga sebenarnya sejalan dengan fenomena empirik aspirasi masyarakat, yang berdasar hasil survei LSI, 71 persen warga DIY menginginkan gubernur/wagub dipilih secara langsung. Yang menginginkan dipilih melalui DPRD hanya 7 persen (dokumen Kemendagri,2010) (SKH Radar Jogja, 8 Desember 2010)

c. Netral

Kategori netral dalam penelitian ini bila tidak ditemukan pernyataan atau pembahasan mengenai mekanisme pengisian jabatan gubernur atau ditandai

dengan adanya pernyataan bersikap netral, tidak memihak antara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY melalui mekanisme penetapan maupun pemilihan, seperti berikut yang tercantum dalam paragraf berikut :

Tanpa referendum, bisa saja opsi penetapan atau pemilihan bertentangan dengan demokrasi. Apakah pemilihan gubernur di DIY masih dianggap demokrasi bila ternyata rakyat Jogjakarta menginginkan penetapan? Sebaliknya, masihkah penetapan dipaksakan bila kenyataannya rakyat menginginkan pemilihan? (SKH Radar Jogja, 2 Desember 2010)

H. Metodologi Penelitian

H.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu.⁶⁰ Riset kuantitatif adalah riset yang menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan. Riset ini tidak mementingkan kedalaman data atau analisis namun lebih kepada aspek keluasan data sehingga data atau hasil riset dianggap merupakan representasi dari seluruh populasi.⁶¹

H.2. Teknik Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi sebagai metode pengolahan data opini, seperti yang dikatakan oleh Berelson dan Kerlinger bahwa analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, objektif dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak.⁶² Opini sebagai objek penelitian dalam analisis isi merupakan bentuk komunikasi yang akan

⁶⁰ Kriyantono, *Op.cit*, hlm. 69

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 57

⁶² *Ibid.*, hlm.228

dianalisis dengan cara mengidentifikasi karakteristik-karakteristik khusus suatu pesan secara objektif dan sistematis.⁶³

Artikel opini merupakan representasi pribadi penulis opini yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan dalam rubrik *opinion page* di surat kabar. Pernyataan-pernyataan ataupun pendapat-pendapat secara individu ini akan digeneralisasikan. Penggeneralisasian dilakukan terhadap sampel artikel yang telah dipilih dan diuji melalui alat ukur yang berupa kategorisasi-kategorisasi dalam unit analisis.

H.3. Objek penelitian

Objek penelitian adalah artikel opini-editorial dalam surat kabar lokal SKH Radar Jogja, SKH Kedaulatan Rakyat dan SKH Bernas dalam periode Desember 2010- Januari 2011. Pemilihan periode ini dikarenakan isu mengenai keistimewaan DIY hampir selalu menjadi *headline* dalam surat kabar harian lokal pasca pernyataan Presiden SBY dalam rapat kabinet 26 November 2010 yang menimbulkan respon dari berbagai pihak. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif maka jumlah data atau item yang digunakan sebagai objek penelitian menjadi pertimbangan penulis. Dalam periode tersebut, kemunculan berita dan artikel opini cukup tinggi jika dibandingkan dengan periode-periode lainnya. Dengan demikian mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian dengan jumlah data yang memadai.

⁶³ Bruce Chadwick, Howard Bahr, Stan Albrecht, *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*, (IKIP Semarang Pers, 1991), hlm.270

H.3. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh artikel opini editorial yang membahas isu keistimewaan DIY yang terbit dalam periode yang sudah ditentukan penulis yakni Desember 2010 hingga Januari 2011. Dari data artikel yang memenuhi kriteria diatas, maka terdapat 42 buah artikel yang menjadi populasi dalam penelitian ini.

Selanjutnya untuk menentukan sampelnya, peneliti menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan teknik sampling *purposive sampling*. Pemilihan teknik ini didasarkan pada penelitian-penelitian yang mengutamakan tujuan penelitian daripada sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian.⁶⁴ Sampelnya adalah artikel opini editorial yang membahas tentang isu keistimewaan DIY yang mengkaji isu tersebut dari sudut pandang politik dalam periode Desember 2010 sampai Januari 2011. Sehingga tidak semua artikel opini-editorial dijadikan sample penelitian. Dengan demikian jumlah sampel yang dipakai dalam penelitian ini menjadi 38 buah. Berikut daftar sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1.2. Sampel Artikel Opini-Editorial dalam SKH Kedaulatan Rakyat, SKH Bernas, dan SKH Radar Jogja Terkait Keistimewaan DIY Periode Desember 2010 – Januari 2011

Surat Kabar	Judul Artikel Opini	Jumlah
SKH Kedaulatan Rakyat	Monarki, Demokrasi dan Konstitusi	
	Monarki Versus Demokrasi?	
	Kontroversi Monarki Konstitusi	
	Keistimewaan Yogyakarta Buat Siapa?	
	Kemasan Demokrasi – Perilaku Tirani	
	Demokrasi Meniscayakan Kearifan Lokal	

⁶⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.115

	Alternatif Solusi RUU Keistimewaan	27
	RUUK DIY : Pak Beye dan Pak Harto	
	Martabat Ngayogyakarta	
	DIY kembali ke Zaman Kolonial	
	Demokrat, Keraton dan Istana	
	Apa Sih, istimewanya DIY?	
	Jangan Posisikan Demokrasi sebagai Palu	
	Ada UU No 3/1950 Bukan Soal Pembentukan DIY	
	65 Tahun Republik Jogja	
	Sesudah Monarki Konstitusional	
	Keistimewaan Yogyakarta di Era Demokrasi	
	RUUK DIY, Perspektif Politik-Kemanusiaan	
	Nasib, Masa Depan dan Status Hukum DIY	
	Mendalami Keistimewaan dan Penetapan	
	Perlu Bekal Semangat 'Golog Gilig'	
	Pro Keistimewaan: Kuantitas atau Kualitas?	
	Basis Keistimewaan Kepemimpinan DIY	
	Perspektif Fiqih Keistimewaan	
	Potret Demokrasi DIY	
	Sisi Lain Keistimewaan Yogyakarta	
	RUUK dalam Perspektif Budaya	
SKH Radar Jogja	Kasus Jogja: Rangkap Dua atau Tiga?	7
	Sidang Rakyat (Jogja)= Demokrasi	
	Sidang Rakyat, Potensi Lahirkan HB XI dan PA x	
	Jakarta-Jogja: Perspektif Government Networking	
	Referendum Menentukan Keistimewaan DIY	
	Antara Ngayogyakarta-Surakarta	
	SBY, Sultan dan Demokrasi Lokal	
SKH Bernas	Pembodohan Rakyat Jogja	4
	Ancaman Kisruh Pengelolaan Tanah di Jogja	
	SBY, Jujurlah pada Rakyat Jogja!	
	Efek 'Erupsi' 26 November	
Total		38

Sumber : SKH Kedaulatan Rakyat, SKH Bernas, SKH Radar Jogja

Artikel opini yang digunakan sebagai sampel penelitian berjumlah 38 buah artikel. 27 artikel bersumber pada SKH Kedaulatan Rakyat, 7 artikel pada SKH Radar Jogja dan 4 artikel pada SKH Bernas.

H.4. Teknik analisis data

- **Distribusi frekuensi**

Analisis data menurut Moleong dalam Kriyantono didefinisikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁶⁵

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui perspektif atau cara pandang para penulis opini surat kabar terhadap isu-isu politik keistimewaan DIY. Analisis data pada penelitian ini menggunakan riset kuantitatif yakni perhitungan melalui uji statistik. Ada beberapa tahap yang dilakukan peneliti sebelum menganalisis data. Pertama, merumuskan masalah. Rumusan masalah bertujuan untuk membuat batasan masalah yang ingin diketahui peneliti, yakni bagaimana isu-isu politik keistimewaan DIY dari sudut pandang penulis opini dalam surat kabar harian lokal. Tahap selanjutnya adalah, peneliti menentukan unit analisis yang merupakan turunan dari teori dan kerangka konsep dan kemudian melakukan penentuan populasi dan penarikan sampel.

Sampel yang telah dipilih akan diuji melalui kategorisasi-kategorisasi sebagai alat ukur yang diharapkan dapat dipercaya dan reliabel jika digunakan untuk mengukur fenomena yang sama. Agar alat ukur tersebut reliabel maka diperlukan uji reliabilitas (*intercoder reliability*). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Holsti untuk melakukan uji reliabilitas, sebagai berikut (Kriyantono,2006:235):

⁶⁵ Kriyantono, *Op.cit*, hlm. 163

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

Keterangan :

CR : *Coefficient Reliability*

M : Jumlah pernyataan yang disetujui

N1, N2 : Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkoding (hakim) dan periset

Melalui rumus Holsti di atas, peneliti melakukan pretest dengan cara mengkoding sampel ke dalam kategorisasi. Setiap kategori diberi kode angka ([1],[2],[3]..dst) dan periset memilih kategori-kategori yang sesuai pada setiap sampel penelitian. Misal, kategori arah opini, [1]Pro Penetapan [2]Kontra Penetapan [3]Netral dipilih salah satu yang paling sesuai dengan sampel artikel opini. Pengkodingan tidak hanya dilakukan oleh periset namun juga seorang atau lebih yang lain yang berfungsi sebagai pembanding. Pengujian ini dikenal dengan sebutan uji antarkode atau interkode sedangkan pembanding disebut interkoder.

Menurut Birowo, ambang penerimaan yang digunakan untuk menguji reliabilitas kategorisasi adalah 0.60.⁶⁶ Ambang penerimaan tersebut menjadi batas bahwa kategorisasi operasional penelitian dapat dipercaya atau diandalkan.

- **Tabel Silang (*Cross Tabulations*)**

Tabel silang merupakan metode sederhana analisis data yang menggunakan tabel yang berfungsi untuk menjelaskan kecenderungan hubungan

⁶⁶ Antonius Birowo, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Yogyakarta: Gitanyali,2004), hal 157. Dikutip dari penelitian Skripsi *Kredibilitas Media dalam Pemberitaan Mengenai Muktamar Muhammadiyah*, oleh Yoana Berchmans (Universitas Atma Jaya Yogyakarta,2011).

antara dua variabel atau lebih.⁶⁷ Dalam penelitian ini, tabulasi silang dilakukan pada variabel unit analisis penulis opini dengan arah atau kecenderungan opini, isi opini dan isu politik. Kategori karakteristik sosial (pekerjaan) penulis opini antara lain akademisi, politisi atau pejabat pemerintah, pengamat atau pemerhati, budayawan, sejarawan, peneliti, pegawai nonpemerintah dan masyarakat awam. Data yang diperoleh melalui sampel penelitian, dimasukkan dalam kategori tabulasi silang kemudian dilakukan interpretasi data terhadap hubungan antar variabelnya.

H.5. Teknik Pengumpulan Data

Riset komunikasi kuantitatif memiliki beberapa metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka atau dokumentasi.

Studi pustaka adalah sebuah proses mencari berbagai literatur, hasil kajian atau studi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan yakni mengenai isu keistimewaan DIY, peristiwa-peristiwa terkait maupun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumen publik sebagai data primer yang berupa artikel opini dalam SKH Kedaulatan Rakyat, SKH Bernas dan SKH Radar Jogja yang dimuat pada periode Desember 2010 dan Januari 2011. Studi pustaka dalam penelitian ini juga diperoleh melalui jurnal-jurnal penelitian, buku teks, surat kabar dan media internet.

⁶⁷ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.149